

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL
(PERSERODA)
TAHUN 2025**



**Jl. Brigjend Katamso No. 49 Wonosari Gunungkidul
TELEPON: 0274391270**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT BPR Bank Daerah Gunungkidul
Alamat	Jl. Brigjend Katamso Nomor 49, Purbosari, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Telepon	0274 391270

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum sepenuhnya pulih.

PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kab Gunungkidul. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola **3. Cukup Baik**

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama Jabatan	Suci Sulistyawati, S.H. Direktur Utama
		Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:
	1. Tugas-tugas Direktur Utama : a) Membawahkan Bisnis, Umum, Keuangan, Akunting, SDM dan IT. b) Melakukan pengawasan dan pemantauan langsung kinerja bagian Satuan Kerja Audit Intern. c) Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). d) Membina serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab bagian-bagian dalam struktur organisasi PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. e) Melakukan koordinasi dengan anggota Direksi dalam tugas antar Direksi serta terhadap kebijakan-kebijakan seluruh kegiatan operasional bank, untuk meningkatkan kinerja BPR. f) Menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Rencana Bisnis BPR. g) Menjaga dan meningkatkan kinerja PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). h) Memantau perkembangan kinerja PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). i) Mewakili dan melakukan negoisasi dalam membuat kesepakatan dengan pihak ketiga dengan prinsip kehati-hatian serta menguntungkan bagi BPR.	
2.	Nama Jabatan	Yustika Ari Sukapti, S.E. Direktur Kepatuhan
		Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:
	1. Tugas-tugas Direktur kepatuhan a) Membawahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT, b) Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir. c) Meminimalkan risiko kepatuhan terhadap jalannya kegiatan operasional bank. d) Bersama jajaran Direksi merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam Rencana Bisnis BPR. e) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan. f) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. g) Melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengembangan bersama jajaran yang dibawahnya h) Meneliti kebenaran dan kesempurnaan tentang kekuatan yuridis akta perjanjian dengan pihak-pihak. i) Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan kepada Dewan Komisaris secara	

tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai.

- j) Wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
- k) Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya
- l) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan
- m) Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi.
- n) Memantau serta menetapkan langkah-langkah penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- o) Tidak diperkenankan untuk membawahi bagian Bisnis dan Audit Intern
- p) Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bagian yang dibawahinya

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Realisasi simpanan pada bulan April Rp 288.373.161.654 atau kurang Rp 32.205.783.346 dari RBB Rp 320.578.945.000. Penurunan simpanan yang tidak sesuai RBB perlu dilakukan analisis penyebabnya dan segera terdapat rancangan strategi
2. Strategi peningkatan kompetensi SDM
 - Pelatihan yang bersifat mandatory agar dilaksanakan pada awal tahun
 - Fokus materi pelatihan selain mandatory adalah yang sesuai dengan kebutuhan SDM dan perusahaan
3. Rencana pinjaman pada bank lain yang berfungsi sebagai cadangan likuiditas diproses di triwulan 4 tahun 2025

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1	Nama Jabatan	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M. Anggota Dewan Komisaris (Independen)
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah. c. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional perusahaan, kecuali terkait dengan: 1) Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat	

syariah; dan

2) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

d. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

e. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:

a) Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan

b) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

a) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan

b) Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain

h. Dewan Komisaris wajib :

a) Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

b) Mengusulkan penetapan kebijakan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Yang memuat paling sedikit :

1. Skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan

2. Komponen remunerasi; dan

3. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.

i. Dewan Komisaris wajib :

a) Menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

b) Mengusulkan penetapan kebijakan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Yang memuat memuat paling sedikit:

a) Sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

b) Mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/ atau calon anggota Dewan Komisaris

c) Mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite.

j. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan atas:

a) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau

b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

l. Dewan Komisaris yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

- a) Komite audit;
- b) Komite pemantau risiko; dan
- c) Komite remunerasi dan nominasi.
- m. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite - komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
- n. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- o. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Mekanisme rapat dapat diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung
- p. Agenda rapat antara lain mengenal :
 - a) Rencana Bisnis Bank
 - b) Isu - isu strategis perusahaan
 - c) Evaluasi / penetapan kebijakan strategis, dan/atau
 - d) Evaluasi rencana bisnis perusahaan
 - e) Penerapan manajemen risiko
 - f) Pelaksanaan tugas komite
 - g) Tindak lanjut Direksi terhadap pemeriksaan audit internal, audit eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.

2.	Nama	Kelik Yulianto, S.Sos., M.M.
	Jabatan	Anggot Dewan Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
- b. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah,
- c. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional perusahaan, kecuali terkait dengan :
 - 1) Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - 2) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.
- d. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan BPR.
- e. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan

Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:

- a) Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan
- b) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

- a) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan
- b) Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain

h. Dewan Komisaris wajib:

- a) Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- b) Mengusulkan penetapan kebijakan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Yang memuat paling sedikit:

- 1. Skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
- 2. Komponen remunerasi; dan
- 3. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.

i. Dewan Komisaris wajib:

- a) Menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- b) Mengusulkan penetapan kebijakan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Yang memuat memuat paling sedikit:

- a) Sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- b) Mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/ atau calon anggota Dewan Komisaris
- c) Mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite.

j. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan atas:

- a) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau
- b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

l. Dewan Komisaris yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

- a) Komite audit;
- b) Komite pemantau risiko; dan
- c) Komite remunerasi dan nominasi.

m. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite - komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

n. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan anggota Direksi untuk memberikan

penjelasan tentang segala hal mengenai perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

o. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Mekanisme rapat dapat diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

p. Agenda rapat antara lain mengenai :

- a) Rencana Bisnis Bank
- b) Isu - isu strategis perusahaan
- c) Evaluasi / penetapan kebijakan strategis, dan/atau
- d) Evaluasi rencana bisnis perusahaan
- e) Penerapan manajemen risiko
- f) Pelaksanaan tugas komite
- g) Tindak lanjut Direksi terhadap pemeriksaan audit internal, audit eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Agar penghimpunan dana agar lebih dikembangkan pada penghimpunan dana dari masyarakat, dari siswa sekolah dan dana yang bersumber dari dana pemerintah (mengendap) dengan harapan dana tersebut lebih stabil dan suku bunga yang relatif rendah.
2. Agar direksi secara rutin untuk memberikan laporan Kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham Pengendali.
3. Direksi agar membuat laporan monitoring strategi bisnis (funding dan lending).
4. Dewan Komisaris menyarankan menggandeng BPKP untuk melakukan review terhadap SOP yang telah ada, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan serta peningkatan efektivitas pengendalian internal.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1. Komite Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	01. Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank. b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank. c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan jasa yang
--	---

diberikannya.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.

Jumlah Rapat

6

Program Kerja Komite:

- Review terhadap kebijakan manajemen dalam implementasi kebijakan operasional bank
- Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas pihak internal (SKAI) dan temuan pihak eksternal (OJK, KAP, BPK)
- Melakukan rapat kerja dengan SKAI terkait laporan laporan dari SKAI dan hasil temuan pihak eksternal
- Menghadiri rapat kerja dewan komisaris membahas kinerja bank BDG maupun hasil kerja Komite Dewan Komisaris
- Kegiatan lain yang diperlukan

Realisasi Program Kerja Komite:

- Review terhadap kebijakan manajemen dalam implementasi kebijakan operasional bank
- Pemantauan terhadap tindak lanjut atas pihak internal (SKAI) dan temuan pihak eksternal (OJK, KAP, BPK)
- Rapat kerja dengan SKAI terkait laporan laporan dari SKAI dan hasil temuan pihak eksternal
- Rapat kerja dewan komisaris membahas kinerja bank BDG maupun hasil kerja Komite Dewan Komisaris

2. Komite

02. Komite Pemantau Risiko

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas dan Tanggung Jawab : - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. - Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko. - Mendokumentasikan hasil komite sebagai arsip dan output dari Rapat Komite. Jumlah Rapat 5
Program Kerja Komite: - Review terhadap kebijakan manajemen risiko dalam implementasi kebijakan operasional bank - Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas temuan pihak eksternal (OJK, KAP, BPK) dan pihak internal (SKAI) - Melakukan rapat kerja dengan SKMR terkait laporan-laporan SKMR dan Kepatuhan - Menghadiri rapat kerja dewan komisaris membahas kinerja bank BDG maupun hasil kerja Komite Dewan Komisaris - Kegiatan lain yang diperlukan Realisasi Program Kerja Komite: - Review terhadap kebijakan manajemen risiko dalam implementasi kebijakan operasional bank - Pemantauan terhadap tindak lanjut atas temuan pihak eksternal (OJK, KAP, BPK) dan pihak internal (SKAI) - Rapat kerja dengan SKMR terkait laporan-laporan SKMR dan Kepatuhan - Rapat kerja dewan komisaris membahas kinerja bank BDG maupun hasil kerja Komite Dewan Komisaris	
3. Komite Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	03. Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris.

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. sedangkan terkait dengan fungsi Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai; Struktur Remunerasi, Kebijakan Remunerasi dan Besaran atas remunerasi.

e. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.

Jumlah Rapat

2

Program Kerja Komite:

- Penyusunan skala poin gaji pegawai sesuai tugas dan risiko sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1
- Penyesuaian Struktur organisasi dan rotasi pegawai
- Penyesuaian batas usia pegawai untuk jabatan tertentu

Realisasi Program Kerja Komite:

- Evaluasi terhadap perhitungan point gaji pegawai dengan memperhitungkan faktor tanggung jawab dan risiko pekerjaan dengan melakukan pengkajian SK Direksi terkait penetapan skala gaji pegawai
- Evaluasi struktur organisasi dengan menyesuaikan kondisi terkini, serta dilakukan penyesuaian SDM dengan melakukan rotasi untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya fraud.
- Evaluasi terhadap pembatasan usia pegawai untuk posisi jabatan tertentu dalam perusahaan berdasar potensi risiko dalam pekerjaan

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

1.	Nama Anggota Komite	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M.
	Keahlian	Komisaris Independen
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	01. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya

2	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
	Nama Anggota Komite Keahlian	Ahmad Ma'Ruf, S.E, M.Si a.Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Manajemen risiko Perbankan (level1). b.Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Bank Perkreditan Rakyat bidang Komisaris (Sertifikat VI). c.Dosen Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. d.Peneliti utama Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT). e.Tenaga ahli Bidang Perekonomian Bappeda DIY.
3	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
	Nama Anggota Komite Keahlian	Muhammad Fikron Washly, SE a.Pendidikan Magister Sains Ekonomi UGM. b.Sebagai peneliti di bidang perekonomian, sampai saat ini sudah melakukan penelitian sebanyak 51 penelitian.
4	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya

4.	Nama Anggota Komite	Listyo Wiendrianto, SE
	Keshlian	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak
5.	Nama Anggota Komite	Panji Ngadio, S.Kom.
	Keshlian	Kepala Bagian SDM, sehingga fungsinya sesuai dengan komite remunerasi
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suci Sulistyawati, S.H.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Yustika Ari Sukapti, S.E.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Kelik Yuniantoro, S.Sos., M.M.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Suci Sulistyawati, S.H.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Yustika Ari Sukapti, S.E.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Kelik Yuniantoro, S.Sos., M.M.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPSIS

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki Kepemilikan Saham pada Kelompok Usaha BPR lain.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Suci Sulistyawati, S.H.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Yustika Ari Sukapti, S.E.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Kelik Yudiantoro, S.Sos., M.M.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisari tidak memiliki Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suci Sulistyawati, S.H.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yustika Ari Sukapti, S.E.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Kelik Yuniantoro, S.Sos., M.M.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.
 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

	Nama	Suci Sulistyawati, S.H.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2	Nama	Yustika Ari Sukapti, S.E.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1	Nama	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2	Nama	Kelik Yuniantoro, S.Sos., M.M.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.
 Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp544.800.500
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp408.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp828.223.538
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp230.485.800
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp141.265.491

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
---	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp737.534.845
---	---------------

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
--	---------

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp192.000.000
--	---------------

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
---	---------

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp134.400.000
---	---------------

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.3 Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp2.640.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4 Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	6,60 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,42 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,26 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 4,74 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 6,59 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 30 Januari 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan CKPN

2. Tanggal Rapat 30 Januari 2025

Jumlah Peserta 4 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan CKPN

3. Tanggal Rapat 06 Maret 2025

Jumlah Peserta 4 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari dan Februari 2025

4. Tanggal Rapat 24 April 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2025

5. Tanggal Rapat 24 April 2025

Jumlah Peserta 4 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2025

6. Tanggal Rapat 24 Juni 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2025	
7.	Tanggal Rapat	25 Juni 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2025 dan Rencana Perubahan RBB	
8.	Tanggal Rapat	25 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2025	
9.	Tanggal Rapat	28 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2025	
10.	Tanggal Rapat	08 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2025	
11.	Tanggal Rapat	10 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan RBB Tahun 2026	
12.	Tanggal Rapat	11 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan RBB Tahun 2026	

Rapat yang tercatat ini merupakan rapat yang teragenda. Namun diluar jadwal rapat ini Dewan Komisaris melakukan koordinasi rutin dengan Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1	Nama Anggota Dewan Komisaris	Fahmy Akbar Idries, S.E., M.M.
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kelik Yudiantoro, S.Sos., M.M.
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	12 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi:

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	----------------

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
-----------------------------------	----------------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
---------------------------------------	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
--	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	----------------

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
-----------------------------------	----------------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
---------------------------------------	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
--	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	---------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	---------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	---------

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	---------

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

16.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	---------

16.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	---------

Nihil.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1	Tanggal Pelaksanaan	13 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Dampak Bencana Tanah Longsor Padukuhan Sawur Sawahan Ponjong
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
2	Tanggal Pelaksanaan	13 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan Dan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
3	Tanggal Pelaksanaan	17 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Pembuatan Taman Perindang Dan Tong Sampah Kalurahan Selang
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
4	Tanggal Pelaksanaan	19 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Berupa Hand Sprayer Elektrik Kelompok Tani Dadi Subur Bulu Bejiharjo
	Jumlah (Rp)	Rp6.600.000
5	Tanggal Pelaksanaan	21 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Pembangunan Mushola Al Kautsar Tumpak Ngawu
	Jumlah (Rp)	Rp15.000.000
6	Tanggal Pelaksanaan	06 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Bagi Warga Tindak Mampu Bapak Santoso Kemejing
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	11 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Mengembangkan Objek Pariwisata Goa Pindul
	Jumlah (Rp)	Rp8.400.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	11 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Kegiatan Penyuluhan Kenakalan Remaja Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pemdes Getas
	Jumlah (Rp)	Rp15.000.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	05 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Media Online Sorot Media Program 3 Menit
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	05 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Berupa Hewan Ternak Kelompok Ternak Ngremboko Ngaliyan Nglipar
	Jumlah (Rp)	Rp20.000.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	07 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Pengembangan Produk Olahan

		Pangan Lokal Mendukung Upaya Perbaikan Status Gizi Karangasem
	Jumlah (Rp)	Rp2.041.950
12.	Tanggal Pelaksanaan	13 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Pengadaan Alat Olahraga Beladiri Pemuda Ledoksari Kepek Wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp4.335.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	20 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana CSR Pembangunan Sumur Bor Dan PIPANISASI Wanita Tani Sri Rejeki Grogol Paliyan
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	20 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Kelompok Ecoprint Idjo Godhong Teguhan Wunung
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	20 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Sumur Bor Kelompok Tani Taruna Muda
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	20 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Pengeboran Sumur Dan Pembuatan Resorvoir Pengelola Air Bersih Sari Tirta

	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	20 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Pengadaan Alat Box Sound System Umkm Muda Karya 09 Kenteng Mulusan
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan CSR Alat Pembuatan Emping Melinjo Kelompok Makmur 2
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	04 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Wakap Perluasan Tanah Masjid Al Ikhlas Siyono Wetan
	Jumlah (Rp)	Rp1.300.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	04 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Al Kahfi Gembuk Getas Playen Gunungkidul
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
21.	Tanggal Pelaksanaan	04 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Al Hidayah Sdn Trengguno Ponjong
	Jumlah (Rp)	Rp500.000

22.	Tanggal Pelaksanaan	07 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Buka Puasa Ramadhan Lapas Kelas Iib Wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
23.	Tanggal Pelaksanaan	10 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Takjil Masjid Ummu Faishal Purbosari Wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
24.	Tanggal Pelaksanaan	11 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid Al Muttaqin Sendowo Kidul Kedung Keris Nglipar
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
25.	Tanggal Pelaksanaan	11 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Rumah Tahfidz Amanah
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
26.	Tanggal Pelaksanaan	11 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Laz Balqis Peduli Karangijo Wetan Ponjong
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
27.	Tanggal Pelaksanaan	12 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat

	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dan Zis Yayasan Bangun Umat Nurani Plumbungan Gedangrejo Karangmojo
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
28	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Takbir Keliling Jamaah Islam Gadungsari
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
29	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Pesantren Kilat Bulan Ramadhan Sd N Sambeng I Ngawen
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
30	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Bazar Masjid Al Imam Petoyan Giritirto Purwosari Gk
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
31	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Takjil Bulan Ramadhan Karangtaruna Padukuhan Pati Genjahan Ponjong
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
32	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan Kamar Mandi Dan Tempat Wudhu Masjid Al Hidayah

	Jumlah (Rp)	Senggotan Ngoro Oro Rp500.000
33	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Mushola Al Istiqomah Duwetrejo Karangtengah Wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
34	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Renovasi Mushola Al Istiqomah Duwetrejo Karangtengah
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
35	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Mushola Nurul Janah Siyono Tenagh Logandeng
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
36	Tanggal Pelaksanaan	14 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid At- Taqwa Karangtritis Sumberwungu Tepus
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
37	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dan Azis Panti Asuhan Dan Pesantren Ar Raafi U Tegalrejo Gari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000

38	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Keagamaan Masjid Birrul Walidain Dunggubah I Duwet Wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
39	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zakat Masjid Nurul Huda Mungup Wuni Giricahyo Purwosari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
40	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid Baiturrahim Tegalrejo Gari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
41	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Pesantren Ramadhan Literasi Ceria Sd Muhammadiyah Karangtengah
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
42	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Mushola Al Taqwa Kranon 005 006 Kepek Wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
43	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Zis Masjid Lillahi Kerdon Karangarsi Semin
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
44	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Takbir Keliling Karangtaruna Reska Karangasem Mulo
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
45	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dan Pembangunan Masjid Al Ikdas Plumbungan 014 004 Putat Patuk
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
46	Tanggal Pelaksanaan	20 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid Al Amin Gabung Gircahyo Purwosari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
47	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid Al Mutaqim Jurangjero Ngawen
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
48	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pengadaan Peralatan Hadroh Masjid Nurul Rahmah Hidayah Wonotono

		Jatlayu Karangmojo
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
40.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid Al Fajar Sangen li Banjarejo Tanjungsari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
50.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Mushola Al Munawaroh Giripurwo Purwosari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
51.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid Al Hikmah Trembono Tegalrejo Gedangsari
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
52.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Zis Masjid Ar Rahman Jurangjero Ngawen
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
53.	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Bakti Sosial Sembako Lansia Bulan Ramadhan Forum Komunikasi Pemuda Peduli Sosial
	Jumlah (Rp)	Rp200.000

54	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dan Abakti Sosial Anak Yatim
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
55	Tanggal Pelaksanaan	08 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Takbir Keliling Dan Syawalan 1446H Masjid Nurussalam Mendongan
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
56	Tanggal Pelaksanaan	08 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Akjii Gunungkidul
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
57	Tanggal Pelaksanaan	26 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Tali Asih Dan Paket Sembako Dalam Rangka Hut Ke 40 Pt Bpr Bdg Tahun 2025 Panti Asuhan Playen,Kelor,
	Jumlah (Rp)	Rp18.000.000
58	Tanggal Pelaksanaan	26 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Paket Sembako Untuk Bpk Baryadi Kemorosari Wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp1.081.000
59	Tanggal Pelaksanaan	03 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Untuk Bpk Sukirno Karangduwet Karangmojo
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
60.	Tanggal Pelaksanaan	04 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha 1446 H Tahun 2025
	Jumlah (Rp)	Rp6.500.000
61.	Tanggal Pelaksanaan	16 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Masjid Nurul Hadi Logandeng Playen
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
62.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana csr pengadaan hewan ternak berupa domba kelompok ternak domba mitra sejahtera tambakrejo semanu
	Jumlah (Rp)	Rp15.000.000
63.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana csr pembangunan LPMP padukuhan ngasemrejo salam patuk
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
64.	Tanggal Pelaksanaan	03 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat

	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana csr pembangunan sumur bor dan pipanisasi kelompok tani sedyo widodo giring pallyan
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
65.	Tanggal Pelaksanaan	12 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana csr program gerakan orang tua asuh cegah stanting (genting) 2025 kapanewon playen
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
66.	Tanggal Pelaksanaan	16 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana csr program pembangunan sumur bor kalurahan gari wonosari
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
67.	Tanggal Pelaksanaan	18 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana csr program pengadaan wireless sound speaker karang taruna remaja tunas muda beji patuk
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
68.	Tanggal Pelaksanaan	07 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Pembelian Hewan Kambing
	Jumlah (Rp)	Rp15.000.000
69.	Tanggal Pelaksanaan	07 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Pengadaan Tenda Galfalum dan Penerangan

	Jalan Lingkungan
Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
70. Tanggal Pelaksanaan	07 Agustus 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Masyarakat
Penjelasan Kegiatan	Pembelian Peralatan Produk Inovasi Stik daun Singkong
Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
71. Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Masyarakat
Penjelasan Kegiatan	Bantuan pengadaan Toren dan Pipanisasi
Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
72. Tanggal Pelaksanaan	25 Agustus 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Masyarakat
Penjelasan Kegiatan	Pembangunan Jalan Lingkungan Padukuhan Kranon RT 003 Rw 006 Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari
Jumlah (Rp)	Rp7.000.000
73. Tanggal Pelaksanaan	11 September 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Masyarakat
Penjelasan Kegiatan	Bantuan Hibah Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lembaga Pemberdayaan Kalurahan Gading Kapanewon Playen
Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
74. Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Masyarakat
Penjelasan Kegiatan	Permohonan Bantuan Peralatan Dalam Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Serta Inovasi Produk Industri

		Kerajinan Perak Kelompok Kerajinan Perak dan Tembaga "Surya Silver" padukuhan Blekonang I Kalurahan Tepus
	Jumlah (Rp)	Rp14.500.000
75	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Csr Pengembangan Produk Olahan Pangan Lokal Mendukung Upaya Perbaikan Gizi Ibu Karangasem Paliyan
	Jumlah (Rp)	Rp2.958.050
76	Tanggal Pelaksanaan	09 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Proposal Permohonan perbaikan Jalan Padukuhan Jatisari- Tengger Kalurahan Sawahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul
	Jumlah (Rp)	Rp40.000.000
77	Tanggal Pelaksanaan	07 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Proposal Permohonan Bantuan Laptop Untuk Mendukung Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab Gunungkidul
	Jumlah (Rp)	Rp2.918.560
78	Tanggal Pelaksanaan	07 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Proposal Permohonan Bantuan Dan Praseraha Penerangan Jalan Umum " Padukuhan Regedeg" Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000

79.	Tanggal Pelaksanaan	07 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Proposal Kegiatan Penelitian Intervensi Olahan Pangan Lokal Berbasis Tempe dan Pisang Untuk Perbaikan Status Gizi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) Di Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Di Yogyakarta
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
80.	Tanggal Pelaksanaan	10 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana CSR untuk bencana alam banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
81.	Tanggal Pelaksanaan	08 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	proposal CSR Perbaikan Jalan Pondok Pesantren Al hikmah Gubugrubuh Desa Getas Kapanewon Playen
	Jumlah (Rp)	Rp3.500.000
82.	Tanggal Pelaksanaan	12 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Proposal Pembuatan Mushola Al Arsy Komplek Mako Polres Nglipar
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
83.	Tanggal Pelaksanaan	19 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana CSR untuk bencana alam banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra (Korpri)

	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
84.	Tanggal Pelaksanaan	19 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana CSR untuk bencana alam banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra (Perbarindo DIV)
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
85.	Tanggal Pelaksanaan	06 Januari 2026
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	proposal bantuan untuk keberangkatan Salah Satu Siswa SMP Muhammadiyah 2 Tepus yang akan mengikuti olimpiade Makasar
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
86.	Tanggal Pelaksanaan	10 Januari 2026
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana CSR Pembangunan Gedung Pertemuan kelompok Sadar Wisata Baron Indah di Pantai Baron
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
87.	Tanggal Pelaksanaan	12 Januari 2026
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Proposal bantuan dana untuk beasiswa anak ber prestasi SDN Pangkah Karangmojo
	Jumlah (Rp)	Rp905.000
88.	Tanggal Pelaksanaan	11 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Pembangunan Masjid An Nur Karangpilang Kidul Rejosari

	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
89.	Tanggal Pelaksanaan	11 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Dalam Rangka Pembangunan Mushola Sdn Watusigar I Ngawen
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
90.	Tanggal Pelaksanaan	26 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
91.	Tanggal Pelaksanaan	07 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Dan Sembako Korban Bencana Kebakaran
	Jumlah (Rp)	Rp1.368.000
92.	Tanggal Pelaksanaan	17 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Untuk Melayat Siswa Sd Kamal Kai Wunung
	Jumlah (Rp)	Rp1.298.000
93.	Tanggal Pelaksanaan	21 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Bulurejo Semin
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
94.	Tanggal Pelaksanaan	05 November 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Untuk Melayat Bp Supomo (Nelayan)
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
95.	Tanggal Pelaksanaan	18 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pembuatan Mushola Smk 1 Gedangsari
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
96.	Tanggal Pelaksanaan	02 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Perbarindo Peduli Bencana Alam Di Wilayah Sumatra Utara,Sumatra Barat Dan Aceh
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
97.	Tanggal Pelaksanaan	02 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Donasi Bencana Alam Sumatra Perbamida
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
98.	Tanggal Pelaksanaan	02 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Beasiswa Pendidikan Yayasan Pantiasuhan Islam Playen Periode Des 2025
	Jumlah (Rp)	Rp600.000
99.	Tanggal Pelaksanaan	02 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat

	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Al Huda Sdn Karangmojo li Paliyan
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
100	Tanggal Pelaksanaan	23 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Dana Dalam Rangka Bakti Sosial Panti Asuhan Dalam Rangka Hut Satpam Ke 45
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

Nihil.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gunungkidul, 24 April 2026

PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda)



Suci Sulistyawati, S.H.
Direktur Utama



Yustika Ari Sukapti, S.E.
Direktur Kepatuhan



Kelik Yudiantoro, S.Sos., M.M.
Anggota Dewan Komisaris